

HARIAN MERDEKA

aspirasi rakyat



LAHAN BEKAS KARHUTLA JADI KEBUN SAWIT, PRABOWO : KELEWATAN!

JAKARTA |
Harian Merdeka

Presiden Prabowo Subianto menyoroti lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berubah menjadi perkebunan dalam waktu singkat. Prabowo meminta agar hal itu diselidiki

karena, menurut dia, sudah kelewat.

Prabowo awalnya menerima laporan karhutla oleh Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Rapat digelar secara hybrid dihadiri anggota

kabinet hingga kepala daerah.

"Memang di lapangan betul sekali memang ada upaya-upaya kesengajaan dengan cara membakar, kami menangkap di Jambi ada pelaku pembakaran hutan

Bersambung ke
Halaman 11

Soal Karhutla, Kejagung Siapkan 3 Instrumen Hukum untuk Korporasi

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan tiga instrumen penegakan hukum terhadap korporasi atau perusahaan yang diduga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tiga instrumen tersebut meliputi pidana umum, pidana khusus, dan perdata.

Bersambung ke
Halaman 11

Pengamat: AHY dan Demokrat 'Main Aman'

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai Partai Demokrat sedang memainkan posisi politik yang cukup cerdik di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Demokrat dinilai berusaha tetap menjadi bagian dari pemerintah, tetapi pada saat yang sama enggan kehilangan ceruk elektoral dari masyarakat yang kritis terhadap kekuasaan.

?Sikap tersebut terlihat dari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)



Bersambung ke
Halaman 11

Wamendagri Bima Dorong Penguatan Peran Pemda dalam Reforma Agraria



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam pelaksanaan reforma agraria. Peran tersebut dijalankan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), dukungan pembiayaan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penyelesaian persoalan pertanahan.

“Kemendagri juga menerbitkan pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun sebagai panduan bagi seluruh pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan, termasuk yang terkait dengan reforma agraria,” ujar Bima dalam Rapat Kerja Mendengarkan Pandangan/Masukan Pihak Terkait dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria di Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Bima menjelaskan, sinkronisasi perencanaan diperlukan agar agenda pemerintah pusat dan daerah berjalan selaras. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung upaya tersebut melalui pembinaan teknis perencanaan pembangunan, termasuk sosialisasi dan monitoring percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah.

● (Agus)

Prabowo Geram Karhutla: ‘Omelin Kapolri’ Segera Tindak Korporasi, Cabut Izin hingga HGU

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Polri menindak tegas seluruh pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penegakan hukum diminta tidak berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga menasar korporasi yang diduga terlibat.

Prabowo bahkan membuka kemungkinan pencabutan seluruh izin perusahaan, termasuk hak guna usaha (HGU), apabila terbukti terlibat dalam praktik karhutla.

Perintah tersebut disampaikan Prabowo kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Terbatas Perkembangan Penanganan Bencana Alam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

“Selidiki terus dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya. Kalau perlu kita segera cabut semuanya itu. Semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya dan sebagainya,” tegas Prabowo.

Prabowo menilai karhutla bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan. Ia pun menyoroti dugaan adanya kesengajaan di balik perubahan kawasan hutan yang terbakar menjadi lahan perkebunan



dalam waktu singkat.

“Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau ini korporasi?” ujar Prabowo.

Dalam rapat tersebut, Prabowo juga meminta Kapolri memaparkan perkembangan penegakan hukum terhadap kasus karhutla sepanjang 2026.

“Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?” tanya Prabowo.

Listyo kemudian melaporkan, sejak 1 Januari hingga 6 September 2026, Polri telah menangani 200 laporan polisi terkait karhutla.

Dari ratusan laporan tersebut, sebanyak 138 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus-kasus itu menyebabkan area terbakar mencapai 8.637,35 hektare.

Selain individu, Polri juga

tengah memproses hukum delapan korporasi. Polisi masih melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan lainnya.

Sementara itu, terdapat 42 perusahaan yang telah dikenai sanksi administrasi berupa pembekuan maupun pencabutan izin.

“Ada 200 Laporan Polisi yang saat ini kami proses. Ada 138 tersangka. Kemudian ada 8 korporasi yang kami proses,” kata Listyo. Menurut dia, terhadap 18 perusahaan yang masih didalam, proses pidana akan dilakukan apabila nantinya ditemukan unsur tindak pidana.

“Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses,” tegasnya.

Listyo memastikan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla akan terus berjalan. Jumlah perkara dan tersangka masih berpotensi bertambah seiring tim di lapangan melakukan penyelidikan. ● (Agus)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA, Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H. Mulyadi, Didi, Daenk, Ali.R., Kabiromo Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya. SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp: 081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judol, Gus Ipul Ancam Copot hingga Pecat



JAKARTA |
Harian Merdeka

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan sekitar 1.900 pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) terindikasi terlibat aktivitas judi online (judol) berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Gus Ipul menegaskan Kemensos tidak akan tinggal diam. Pegawai yang nantinya terbukti melanggar akan dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari teguran hingga pencopotan jabatan dan pemberhentian. "Ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan," ujar Gus Ipul di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurut Gus Ipul, Inspektorat Jenderal Kemensos masih melakukan penelusuran dan klarifikasi terhadap data dari PPATK. Dari pegawai yang telah diklarifikasi, lebih dari 70 persen mengakui keterlibatan

dalam aktivitas judi online dengan berbagai kategori.

Ada pegawai yang mengaku sudah kecanduan dan menjadikan judol sebagai kebiasaan. Namun, ada pula yang mengaku hanya mencoba-coba.

Kemensos juga menemukan kasus perangkat milik pegawai digunakan anggota keluarganya untuk aktivitas judol.

Yang lebih mengejutkan, penelusuran juga menemukan dugaan pegawai menggunakan uang kantor untuk bermain judi online. Nilai transaksi yang teridentifikasi bervariasi, dengan rata-rata sekitar Rp4 juta dan ada transaksi yang disebut mencapai lebih dari Rp2 miliar.

Gus Ipul menegaskan penyalahgunaan uang negara untuk judi online merupakan pelanggaran serius.

"Bahkan sebagian sudah kita temukan menggunakan uang kantor," katanya.

Bisa Dicipot hingga Dipecat Kemensos menyiapkan sanksi berdasarkan tingkat

pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, pegawai dapat dikenai teguran. Sementara pelanggaran sedang dapat berujung pada penundaan kenaikan gaji atau pangkat hingga penurunan pangkat.

Adapun pelanggaran berat dapat berujung pada penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sesuai ketentuan disiplin pegawai.

Proses klarifikasi terhadap 1.900 pegawai tersebut ditargetkan selesai pada September 2026. Setelah seluruh data diverifikasi, Kemensos akan menentukan sanksi terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.

Gus Ipul juga mengingatkan seluruh pegawai Kemensos agar menjauhi judi online karena tidak hanya berdampak pada kondisi pribadi dan keluarga, tetapi juga dapat mengganggu kinerja serta mencoreng integritas aparat pemerintah.

● (Agus)

Pejabat Kemenhub Diduga Patok Commitment Fee 5 Persen untuk Proyek Perlintasan Kereta

JAKARTA | **Harian Merdeka**



Dugaan praktik suap dalam proyek perkeraan kembali terungkap. Pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diduga mematok commitment fee sebesar 5 persen kepada PT KA Properti

Manajemen (KAPM) untuk mendapatkan proyek pekerjaan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera Tahun Anggaran 2022.

Dugaan tersebut terungkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap PT KAPM yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026). Dalam dakwaan, Harno Trimadi yang saat itu menjabat Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), disebut menyampaikan permintaan commitment fee tersebut.

Permintaan itu muncul dalam pertemuan pada Desember 2021.

Saat itu, Direktur Utama PT KAPM periode 2022, Yoseph Ibrahim, bersama jajarannya datang untuk menagih pembayaran pekerjaan perbaikan rel akibat banjir di Lemah Abang yang sebelumnya dikerjakan perusahaan.

Pekerjaan tersebut bernilai sekitar Rp5,2 miliar dan disebut telah terlebih dahulu menggunakan anggaran PT KAPM.

Namun, hingga akhir 2021, pembayaran dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub belum dilunasi. Dalam pertemuan tersebut, Harno kemudian disebut menawarkan proyek pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera untuk tahun anggaran 2022.

Namun, proyek tersebut disebut disertai syarat pembayaran commitment fee sebesar 5 persen dari nilai kontrak.

"Dalam pertemuan tersebut, Harno Trimadi menyampaikan adanya commitment fee yang harus dipenuhi oleh terdakwa sebesar 5 persen dari nilai kontrak pekerjaan supaya terdakwa mendapatkan paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa Sumatera TA 2022," kata jaksa dalam persidangan. ● (Agus)

Kejagung ‘Masuk Angin’ Rp40 Miliar Disorot

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Dugaan aliran uang senilai Rp40 miliar yang menyeret nama sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum. Kejaksaan Agung memastikan setiap informasi yang berkaitan dengan perkara akan ditelusuri secara serius dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan penyidik tidak akan mengabaikan informasi yang dinilai relevan dengan kepentingan penyidikan.

“Setiap informasi yang diperlukan untuk penyidikan pasti kita dalam,” kata Anang.

Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah munculnya keterangan mengenai dugaan pemberian uang Rp40 miliar dari pengusaha properti Tan Kian kepada Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho. Namun, dugaan tersebut mendapat bantahan dari kuasa hukum mantan Jaksa Agung



Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Febri Diansyah.

Febri menegaskan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian, uang tersebut disebut diberikan kepada Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho. Bukan kepada Febrie Adriansyah.

Tak hanya itu, Febri menyebut Tan Kian tidak pernah memastikan bahwa uang tersebut di-

berikan kepada empat pejabat di Kejaksaan Agung.

Menurutnya, Tan Kian hanya menyampaikan kemungkinan mengenai peruntukan uang tersebut. Bahkan, Tan Kian disebut tidak mengetahui ke mana uang itu mengalir setelah diserahkan kepada Ferry.

“Jadi Tan Kian mengatakan, ‘bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung’ yang disebut oleh Tan Kian di BAP-nya,” ujar Febri. Keterangan “bisa saja” inilah yang menjadi titik penting dalam perkara tersebut.

Sebab, pernyataan mengenai kemungkinan peruntukan uang berbeda dengan kesaksian yang memastikan siapa penerima atau pihak yang menikmati uang tersebut.

Karena itu, dugaan aliran dana Rp40 miliar masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Penyidik perlu memastikan rangkaian peristiwa secara utuh, mulai dari sumber uang, pihak yang menyerahkan, pihak yang menerima, hingga kemungkinan aliran dana

setelah uang tersebut diserahkan.

Kejaksaan Agung sendiri telah menyatakan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penyidikan akan didalami. Artinya, setiap keterangan akan diuji dan dikonfirmasi dengan bukti-bukti lain sebelum dijadikan dasar untuk menentukan fakta hukum.

Dengan demikian, nama-nama yang disebut dalam sebuah keterangan belum serta-merta dapat dianggap sebagai pihak yang menerima atau menikmati uang tersebut. Kepastian mengenai dugaan aliran dana Rp40 miliar harus menunggu hasil penyidikan dan pembuktian yang sah. ● (Agus)(Agus)

“Jadi Tan Kian mengatakan, ‘bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung’ yang disebut oleh Tan Kian di BAP-nya,”

Kasus TPPU Keluarga Bandar Narkoba Ko Erwin Dilimpahkan, Istri dan Dua Anak Jadi Tersangka

JAKARTA |
Harian Merdeka

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri melimpahkan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat istri dan dua anak bandar narkoba Ko Erwin Iskandar alias Ko Erwin.

Ketiganya diduga terlibat dalam perkara pencucian uang yang berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika yang dilakukan Ko Erwin, salah satu bandar narkoba yang disebut memiliki jaringan besar

di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pelimpahan perkara tersebut menjadi bagian dari proses hukum lanjutan setelah penyidik melakukan pendalaman terhadap aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana narkotika.

Nama Ko Erwin sebelumnya mencuat dalam pengungkapan kasus narkotika dan TPPU yang ditangani Bareskrim Polri. Ia diduga berperan sebagai pemasok narkotika sekaligus mengendalikan aliran dana dari bisnis haram

tersebut.

Dalam perkara ini, Ko Erwin juga diduga memberikan uang suap senilai Rp2,8 miliar kepada mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro.

Ko Erwin ditangkap Bareskrim Polri di perairan Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada 26 Februari 2026. Saat ditangkap, ia diduga tengah berupaya melarikan diri ke Malaysia.

Penangkapan tersebut menjadi titik penting dalam membongkar jaringan narkotika sekaligus



menelusuri dugaan pencucian uang yang dilakukan untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Dengan dilimpahkannya perkara TPPU yang men-

jerat istri dan dua anak Ko Erwin, penyidik kini membawa dugaan keterlibatan keluarga tersebut ke tahap proses hukum berikutnya. ● (Agus)

Kejagung Tetapkan PT Toba Pulp Lestari sebagai Tersangka Korporasi

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing yang berlangsung sepanjang 2008 hingga 2025.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor TAP-48/F.2/Fd.2/09/2026 tertanggal 7 September 2026.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa PT TPL diduga melakukan under invoice-



ing dengan cara mengubah dan memanipulasi kode Harmonized System (HS Code) terhadap produk pulp yang dihasilkan.

Menurut Saiful, perubahan tersebut dilakukan dengan men-

gubah klasifikasi produk dissolving pulp menjadi paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP).

“Produk dissolving pulp, diubah menjadi produk paper grade

pulp atau bleached hardwood kraft pulp atau BHKP,” kata Saiful dalam konferensi pers di Kejagung.

Produk pulp tersebut kemudian dijual PT TPL kepada perusahaan Macau Marketing International Ltd di luar negeri serta Asia Pacific Rayon di Indonesia.

Kejagung juga menemukan dugaan pelanggaran dalam pemenuhan dokumen perpajakan. PT TPL disebut tidak memberikan dokumen transfer pricing atau TP Doc serta laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Badan kepada kantor pelayanan pajak setempat.

Padahal, dokumen tersebut diperlukan untuk menguji kewajaran harga transaksi yang dilakukan perusahaan.

“PT TPL Tbk secara melawan hukum bekerja sama dengan pejabat yang berwenang agar tidak dilakukan pengawasan,” ujar Saiful. ● (Agus)

IPW Laporkan Praktik Mafia Hukum di Bareskrim, Kapolri Perintahkan Irwasum Usut Tuntas



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Indonesia Police Watch (IPW) menyampaikan ucapan terima kasih, sekaligus memberikan apresiasi kepada Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang telah memerintahkan Irwasum Polri untuk memeriksa atas dugaan praktik mafia hukum dalam penanganan Laporan Polisi Nomor 173, tanggal 11 April 2025 oleh penyidik Subdit III Dittipideksus Bareskrim

Polri. Praktik mafia hukum itu diduga juga melibatkan Kepala Biro Wassidik Bareskrim Polri, Brigjen Pol BRS yang berpihak kepada CJ salah satu pihak yang berperkara. Dan melibatkan pula Kabag Dumas Rorenmin Itwasum Polri, Kombes ET, yang menyalahgunakan instrumen Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) untuk mengintimidasi penyidik Direskrim Polda Maluku Utara dan memutarbalikan fakta pengaduan IPW yang melaporkan Karo Wassidik Bareskrim tapi yang hendak di ADTT malah penyidik Dittipiter Bareskrim.

IPW menduga latar belakang keterlibatan para pejabat Polri itu mengandung mens rea pemberian bantuan kejahatan terhadap CJ yang merebut tambang nikel PT ARA

dari pemiliknya yang sah, yang telah menghasilkan penjualan ore nikel sebesar Rp849 miliar.

“Selaku Pendumas IPW meminta agar Irwasum Polri dapat melakukan ADTT atas penanganan LP No 173, yang mengandung praktik mafia hukum yang brutal tersebut. Termasuk menelisik dugaan penyuaian yang bersumber dari dana haram hasil penjualan ore nikel ilegal. IPW berharap kasus ini dapat diusut tuntas agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujar Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW di loby Gedung Bareskrim Polri, Senin, 7 September 2026, usai menyambangi Irwasum Polri untuk mendesak dilakukannya ADTT atas penanganan LP No 173.

Selain Irwasum Polri, Kadiv Propam Polri telah bergerak cepat dengan

memerintahkan Kaden A Biro Paminal untuk memeriksa penyidik Subdit III Dittipideksus Bareskrim Polri. Termasuk Dittipideksus, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak yang diduga telah melakukan pembiaran.

“Saya selaku Ketua IPW yang mengadukan kasusnya telah diperiksa Unit I Detasemen A Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri selaku Pendumas terkait praktik mafia hukum dalam penanganan perkara LP No 173 oleh penyidik Subdit III Dittipideksus Bareskrim Polri” ujarnya.

Menurut Sugeng, kasusnya sendiri bermula ketika pada tanggal 11 April 2025, pukul 17.00 WIB, dengan mengatas namakan PT. ARA, CJ tanpa legal standing melaporkan Notaris

Lily Masita Tomosoa, SH, M.Kn, dkk melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri, sesuai LP No. 173, melekatkan pasal pidana tindak pidana pencucian uang. Padahal ketika membuat LP 173, CJ tidak memiliki dokumen laporan keuangan PT ARA. Baik yang telah diaudit (audited financial report) maupun yang belum diaudit (unaudited financial report), yang dapat dipakai sebagai petunjuk awal telah terjadi dugaan pidana pencucian uang. “Notaris Lily Masita Tomosoa, SH, M.Kn bahkan belum menerima pembayaran jasa notaris atas pembuatan akte tersebut sudah dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang” tukas Sugeng heran.

● (Egi)



Demokrat Tegaskan Pidato AHY Bukan Sinyal Nyapres 2029

JAKARTA |
Harian Merdeka

Partai Demokrat membantah anggapan bahwa pidato Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyinggung batas waktu kekuasaan merupakan sinyal kesiapan maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra menegaskan, pidato AHY justru menunjukkan sikap Demokrat yang tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Herzaky, pernyataan AHY mengenai kekuasaan yang memiliki batas waktu tidak semestinya ditarik ke arah pencalonan presiden. Pidato tersebut, kata dia, lebih merupakan refleksi mengenai demokrasi, amanah kekuasaan, serta tanggung jawab kepada rakyat.

"Keliru kalau statement kekuasaan ada batasnya diartikan AHY membahas Pilpres 2029 dan dianggap sibuk nyapres," ujar Herzaky.

AHY sebelumnya menyampaikan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang melekat secara per-

manen pada seseorang. Jabatan memiliki batas waktu, sementara tanggung jawab kepada rakyat harus terus dijalankan.

Pernyataan tersebut kemudian ditafsirkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sebagai sinyal kuat AHY mulai mempersiapkan diri menjadi kontestan Pilpres 2029. Doli menilai gestur dan posisi politik AHY saat menyampaikan pidato turut memperkuat tafsir tersebut.

Namun, Demokrat menilai tafsir tersebut terlalu jauh. Herzaky menegaskan bahwa fokus AHY saat ini adalah menjalankan tugasnya sebagai bagian dari pemerintahan dan memastikan agenda pemerintahan Prabowo Subianto berjalan dengan baik.

Sikap itu sekaligus menegaskan bahwa Demokrat belum menjadikan kontestasi Pilpres 2029 sebagai agenda utama. Partai berlabel *mercy* tersebut memilih menekankan kerja pemerintahan dan kepentingan rakyat.

Dengan demikian, pernyataan AHY soal batas kekuasaan lebih tepat dipahami sebagai pesan politik mengenai pentingnya demokrasi dan pembatasan kekuasaan, bukan deklarasi terselubung untuk maju dalam Pilpres 2029.

● (Agus)

Ahmad Doli Sebut Pidato AHY Tandai Mulainya Persaingan Menuju Pilpres 2029

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia meyakini Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bakal menjadi kontestan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

Doli merespons pidato AHY dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat pada Sabtu (5/9).

Dia setuju sepenuhnya dengan pernyataan AHY dalam pidatonya yang menyinggung soal kekuasaan sebagai amanah yang memiliki batas waktu.

"Namun, dilihat dari nuansa penyampaian, gestur, dan standing positionnya, AHY seperti memberi signal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang," kata Doli saat dihubungi, Senin (7/9).

Namun, Wakil Ketua Baleg DPR itu mengaku heran dengan substansi pidato AHY. Sebab, saat ini negara tengah menghadapi tantangan besar. Apalagi, Demokrat dan AHY juga bagian dari koalisi pemerintah yang mestinya ikut bertanggung jawab.

Menurut Doli, pernyataan AHY mulai membuka persaingan dalam pilpres mendatang. Dia menduga, beberapa kekuatan yang akan menjadi kontestan mulai pasang kuda-kuda.

"Fenomena seperti itu, semakin menguatkan bahwa ternyata magnet Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda," katanya.

Doli juga menyoroti pidato Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang identik dengan poros kekuatan politik Solo



sebelumnya. Dan kini diikuti AHY sebagai poros kekuatan politik Cikeas, meski keduanya sama-sama berada dalam perahu koalisi pemerintah.

"Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu poros politik penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029," katanya.

Meski begitu, Golkar, kata Doli, menghormati setiap jalan politik setiap partai, sebagai kedaulatan dan otoritas internal. Dia menegaskan pihaknya saat ini tetap fokus membantu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

AHY dalam pidatonya di kantor DPP Partai Demokrat, menyinggung sejumlah isu terkait pemilu. AHY meminta seluruh kader, baik yang berada di eksekutif, legislatif, maupun kepala daerah untuk senantiasa peka dan jujur terhadap kenyataan yang dirasakan oleh rakyat di lapangan.

"Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," katanya.

● (Egi)

Sepakati Empat Tuntutan PPPK, Sufmi Dasco Minta Data Pembanding dalam Sebulan



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Pertemuan 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berbuah manis. Aksi besar-besaran 7 September 2026 yang rencananya melibatkan 35 ribu orang dibatalkan.

Menurut Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah, permintaan PPPK dan PPPK paruh waktu hanya empat. Ketika empat tuntutan itu dikabulkan, otomatis demo 7 September batal dilaksanakan.

Empat tuntutan massa sebagai berikut:

1. Angkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu semua jabatan (teknis, nakes, dan guru) tahun 2026
2. Angkat PPPK semua jabatan (teknis, nakes, guru) tanpa memandang usia menjadi PNS tahun 2027

3. Realisasikan pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK pada 2026
4. Alihkan sumber gaji ASN PPPK dari APBD ke APBN.

“Pak Dasco menyatakan siap merealisasikan empat tuntutan kami. Beliau minta waktu sebulan untuk pembahasannya dan kami berikan waktu,” kata Fadlun seperti dikutip JPNN pada Jumat (4/9/2026).

Selain itu, lanjutnya, ada syarat yang diberikan Sufmi Dasco kepada Aliansi Merah Putih, yakni menyiapkan data pembanding PPPK dan PPPK paruh waktu di semua instansi. Data ini tidak hanya sebatas untuk 10 forum PPPK dan PPPK paruh waktu, tetapi seluruh.

Menurut Fadlin, Aliansi Merah Putih tidak hanya berjuang untuk kelompok tertentu, tetapi seluruhnya.

Pada kesempatan itu, Fadlin mengaku sudah berkoordinasi dengan teman-teman dan

data ini diserahkan kepada Sufmi Dasco pada tanggal 7 September.

Fadlun menegaskan data yang diminta Sufmi Dasco merupakan data pembanding. Data ini akan disandingkan dengan milik pemerintah.

Tujuannya agar tidak ada lagi PPPK dan PPPK paruh waktu yang tercecer. Memang waktu yang diberikan pimpinan DPR RI itu sangat singkat.

Namun, Fadlun optimis data semua ASN PPPK Indonesia baik paruh maupun penuh waktu bisa terkumpul.

“Kami perjuangkan semua walaupun di luar bukan anggota yang tergabung di dalam Aliansi Merah Putih. Teman-teman semuanya sudah bergerak,” ucapnya.

Fadlun mengimbau seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu untuk aktif berkomunikasi dalam pendataan ini, mengingat waktunya mepet.

● (Egi)



Peradi Profesional Ingatkan RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Tekan Lawan Politik

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Peradi Profesional menegaskan dukungan terhadap upaya negara memberantas tindak pidana dan mengembalikan aset hasil kejahatan. Namun, tujuan yang baik tersebut harus dibangun di atas prinsip negara hukum, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan due process of law.

Begitu dikatakan Ketua Umum Peradi Profesional Prof. Harris Arthur Hedar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 9 September 2026.

Dia menegaskan bahwa persoalan paling mendasar bukan semata-mata seberapa luas kewenangan negara untuk merampas aset, tetapi bagaimana memastikan kewenangan tersebut tidak berubah menjadi kekuasaan yang berlebihan dan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

“Jangan sampai semangat merampas aset hasil kejahatan justru membuka ruang bagi perampasan terhadap harta yang diperoleh secara sah,” tegas Harris.

Peradi Profesional mengingatkan DPR agar mekanisme perampasan aset, terutama yang tidak bergantung pada putusan pidana terhadap seseorang, diberikan batasan yang sangat jelas dan pengawasan pengadilan yang kuat.

“Prinsip praduga tidak bersalah, hak milik yang sah, hak untuk membela diri, hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta mekanisme keberatan dan pemulihan harus dijamin secara nyata di dalam undang-undang,” tutur Harris.

Harris juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan beban pembuktian. Katanya, seseorang tidak boleh serta-merta diposisikan seolah-olah bersalah hanya karena tidak mampu menjelaskan asal-usul hartanya. ● (Egi)

Syahrini Tak Masalah Wajah dan Jargonnya Dijadikan Meme

JAKARTA |
Harian Merdeka

Selebritas Syahrini mengaku tidak mempermasalahkan wajah maupun jargon-jargonnya yang kerap dijadikan meme dan bahan parodi di media sosial.

Syahrini mengatakan dirinya memilih tidak ambil pusing dengan berbagai parodi yang dibuat warganet. Menurut dia, hal terpenting adalah tetap berbuat baik kepada orang lain. "Gak apa-apa, aku gak

masalah. Bukan urusan kita, urusan kita itu berbuat baik saja. Semuanya akan kembali lagi kalau kita berbuat baik ke orang lain," kata Syahrini dalam kanal YouTube miliknya yang dilihat *Harian Merdeka*, Selasa (8/9/2026).

Ibu satu anak itu juga menegaskan tidak perlu melakukan tindakan apa pun untuk membalas orang-orang yang menjadikannya bahan parodi.

Syahrini memilih menyikapinya secara positif dan tidak menyimpan rasa sakit hati. Ia juga meminta agar tidak

mengganggu pihak yang membuat parodi selama hal tersebut membuat mereka senang.

"Gak usah diapa-apain mereka, kalau mereka happy dengan kejulitannya tidak usah ganggu. Pikirannya positif saja, damai, gak ada sakit hati dan gak terganggu," ujarnya.

Sejumlah jargon Syahrini memang sempat pop-

uler dan menjadi bagian dari budaya meme di media sosial. Di antaranya "Maju Mundur Syantik" dan "Anda Jangan Julid".

Wajah Syahrini juga beberapa kali digunakan dalam berbagai meme. Ia mengaku pernah melihat foto wajahnya diedit dan digambarkan seolah-olah tertabrak kendaraan.

"Kayak waktu itu wajah aku pernah ya ditabrak truk atau kereta. Gak apa-apa," kata Syahrini. (hmi)



Berprestasi dalam Pelayanan Masyarakat, Kapolres Malang Beri



MALANG |
Harian Merdeka

Kapolres Malang AKBP Rulian Syaury memberikan penghargaan kepada 65 personelnya dalam hal pelayanan ke masyarakat. Pemberian penghargaan dilaksanakan berlangsung saat apel di Mapolres Malang, Senin (7/9/2026) secara langsung kepada 65 personel, yang terdiri dari 63 personel Polri, satu personel PNS, dan satu orang pekerja harian lepas (PHL) di Polres Malang.

Kapolres Malang memberikan langsung penghargaan kepada anggotanya yang memberikan inovasi layanan ke masyarakat. Dimana penghargaan ini jadi bentuk apresiasi pimpinan atas kinerja anggota dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Penghargaan ini bukan sebuah tujuan, tetapi merupakan proses dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik," kata AKBP Rulian Syaury selaku Kapolres Malang dalam sambutannya.

Menurutnya, pihaknya

berkomitmen menjadi penegakan hukum terhadap kejahatan, serta meningkatkan pelayanan kepolisian sebagai pintu masuk masyarakat dalam menerima laporan. Dirinya juga meminta anggota yang belum mendapatkan penghargaan tidak berkecil hati.

"Seluruh personel diminta tetap memberikan pelayanan terbaik dan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak 13 personel Polres Malang juga mendapat apresiasi dari Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Malang. Penghargaan diberikan atas keberhasilan mengungkap perkara tindak pidana dengan modus mengaku sebagai PNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Rulian menyebut, apresiasi dari pihak eksternal menjadi bukti bahwa kinerja anggota kepolisian juga mendapat perhatian masyarakat dan instansi lainnya.

"Ini menjadi kebanggaan bagi kita sekaligus motivasi untuk terus berkarya lebih baik. Setiap tindakan dan kinerja kita diawasi masyarakat,

kat, bukan hanya dari internal kepolisian, tetapi juga banyak pihak," ujarnya.

Menurut Rulian, penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel Polres Malang untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam memberikan pelayanan dan menjaga keamanan masyarakat.

"Jadikan apresiasi ini sebagai pemacu semangat. Pertahankan dan tingkatkan kinerja untuk mewujudkan Kabupaten Malang yang aman dan kondusif serta memastikan kehadiran polisi selalu dirasakan masyarakat," jelasnya.

Selain pemberian penghargaan, Rulian juga mengingatkan jajarannya untuk responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satunya menghadapi musim kemarau yang menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kekurangan air serta potensi kebakaran lahan.

Polisi diminta hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan, sehingga kehadiran Polri tidak hanya terlihat dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam memberikan perlindungan dan pelayanan di tengah masyarakat.

"Polri harus hadir dalam setiap kondisi yang membutuhkan. Kita harus menjadi representasi negara yang hadir di tengah masyarakat," pungkasnya. ● (Egi)

“Penghargaan ini bukan sebuah tujuan, tetapi merupakan proses dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik,”

AKBP Rulian Syaury
Kapolres Malang



11 Jabatan Strategis Polres Tangsel Berganti, Kapolres Boy Minta Pejabat Baru Gerak Cepat

TANGERANG SELATAN | **Harian Merdeka**

Sebanyak 11 jabatan strategis di lingkungan Polres Tangerang Selatan (Tangsel) resmi berganti pimpinan. Rotasi tersebut mencakup sejumlah Pejabat Utama (PJU) hingga Kapolsek di wilayah hukum Polres Tangsel.

Serah terima jabatan (sertijab) digelar di Aula Guyub, Lantai 4 Polres Tangsel, Sabtu (5/9/2026).

Upacara dipimpin langsung Kapolres Tangsel AKBP Boy Tumalolo dan dihadiri Wakapolres, jajaran PJU, para Kapolsek, serta Ketua Bhayangkari Cabang Tangsel bersama pengurus.

Pergantian sejumlah posisi tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi sekaligus langkah penyegaran dan pembinaan karier personel kepolisian.

Kapolres Tangsel AKBP Boy Tumalolo meminta pejabat yang baru tidak berlama-lama melakukan penyesuaian. Mereka dituntut segera memahami karakteristik wilayah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.

Boy juga memberikan apresiasi kepada AKBP Luceria Valentina Sidauruk yang mengakhiri masa dinas karena memasuki masa pensiun. Menurutnya, dedikasi dan loyalitas selama bertugas layak mendapatkan penghargaan.

"Pergantian jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi, penyegaran sekaligus pembinaan karier," ujar Boy.

Ia menekankan, rotasi jabatan tidak boleh sekadar dimaknai sebagai pergantian posisi. Pejabat baru harus mampu membawa semangat dan kinerja baru, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Boy meminta seluruh pejabat baru segera membangun komunikasi dengan personel di satuannya. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga harus diperkuat agar pelaksanaan tugas di lapangan berjalan efektif. ● (Agus)

Pramono Anung Warning Pedagang Masker: Jangan Mainkan Harga di Tengah

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta para pedagang masker tidak memanfaatkan situasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau untuk menaikkan harga secara tidak wajar maupun melakukan penimbunan.

Pramono menegaskan masker merupakan kebutuhan masyarakat di tengah kondisi tersebut sehingga tidak boleh dijadikan komoditas untuk mencari keuntungan berlebihan.

"Ini kan menjadi kebutuhan publik, kebutuhan bersama. Jangan dipermainkan," kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurut Pramono,

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus berupaya membantu masyarakat menghadapi dampak sebaran abu vulkanik. Salah satunya dengan membagikan masker secara gratis di sejumlah tempat umum.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan, tetap mendapatkan perlindungan ketika beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak abu vulkanik.

Sebelumnya, pada Minggu (6/9/2026), sejumlah instansi juga telah menggelar pembagian masker gratis kepada masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain dilakukan Satpol PP Jakarta Selatan, Satpol PP Jakarta Pusat, Direktorat Samapta Polda Metro



Jaya, Polsek Senen, hingga Polsek Metro Kebayoran Baru.

Selain meminta pedagang tidak memainkan harga, Pramono juga mengimbau masyarakat menerapkan sejumlah langkah perlindungan diri apabila wilayah tempat tinggal mulai terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Ia meminta warga menggunakan masker atau perlindungan diri, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menutup pintu dan jendela rumah serta melindungi sumber air agar tidak terkontaminasi abu.

Aktivitas di luar ruangan juga perlu dibatasi apabila paparan abu vulkanik mulai cukup pekat.

Pramono menekankan kewaspadaan masyarakat diperlukan agar dampak sebaran abu vulkanik tidak mengganggu kesehatan dan aktivitas warga Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun memastikan langkah perlindungan masyarakat akan terus dilakukan seiring perkembangan kondisi sebaran abu vulkanik. ●

Proyek Jalan Gardu-Tanah Merah Rp4,7 Miliar Dibongkar, Beton Retak 12 Jam Usai Dicor



TANGERANG |
Harian Merdeka

Proyek lanjutan rekonstruksi Jalan Gardu-Tanah Merah Segmen 4 di Desa Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan.

Pekerjaan jalan bernilai miliaran rupiah tersebut harus dibongkar setelah beton yang baru dicor dinilai tidak memenuhi spesifikasi teknis dan mengalami retak dalam waktu sekitar 12 jam setelah pengecoran.

Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang, Ardiansyah Putra, mengatakan pembongkaran dilakukan karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Menurut dia, berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), beton yang digunakan harus memiliki kuat tekan 45 MPa dan kuat lentur 4,5 MPa dalam waktu tujuh hari setelah pengecoran.

"Karena hasil pekerjaan tidak

memenuhi ketentuan tersebut, kontraktor diwajibkan membongkar bagian yang bermasalah dan melakukan pengecoran ulang," ujar Ardiansyah.

Ia menegaskan, seluruh biaya pembongkaran maupun pengecoran ulang menjadi tanggung jawab penyedia atau kontraktor pelaksana. Dengan demikian, pemerintah daerah maupun masyarakat tidak dibebani biaya tambahan akibat perbaikan tersebut.

Proses perbaikan ditargetkan selesai dalam waktu tujuh hari setelah pengecoran ulang. DBMSDA Kabupaten Tangerang juga memastikan pengawasan akan dilakukan hingga pekerjaan selesai guna memastikan hasil rekonstruksi sesuai spesifikasi dan standar teknis.

Alamat Pemenang Tender Dipertanyakan

Di sisi lain, persoalan proyek tersebut tidak hanya berkaitan dengan kualitas pekerjaan. Tim media juga menelusuri alamat

perusahaan pemenang tender, yakni CV Insan Multi Karya, yang tercatat beralamat di Jalan Jungle Boulevard, Perumahan Talaga Bestari Blok A0 Nomor 21, Kabupaten Tangerang.

Saat alamat tersebut didatangi, lokasi yang tercantum dalam dokumen justru merupakan rumah tinggal. Penghuni rumah mengaku tidak mengetahui adanya kantor CV Insan Multi Karya di lokasi tersebut.

Keterangan serupa disampaikan petugas keamanan perumahan. "Saya nggak tahu, nggak ada. Dari dulu juga nggak ada," ujarnya.

Proyek yang dimaksud tercatat dengan nama Lanjutan Rekonstruksi Jalan Gardu-Tanah Merah Segmen 4, Desa Kayu Agung, dengan nilai pagu dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4.766.547.797. Pekerjaan tersebut merupakan proyek DBMSDA Kabupaten Tangerang dengan CV Insan Multi Karya sebagai pemenang tender. ● (Egi)

SOAL KARHUTLA

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, langkah tersebut disiapkan untuk memastikan penanganan terhadap korporasi yang terkait karhutla dapat dilakukan melalui jalur hukum yang sesuai.

“Khusus untuk jajaran kami, ada menggunakan tiga instrumen dalam penanganan ini. Yang pertama adalah dari pidana umum, pidana khusus dan perdata, perdataan,” kata Burhanuddin usai menghadiri rapat koordinasi pemerintahan dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Graha Marinir Panti Perwira, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Untuk penanganan melalui pidana umum, Burhanuddin telah memerintahkan jajaran kejaksaan di daerah berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan kepolisian. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pemerkasan perkara karhutla.

“Saya sudah perintahkan ke daerah untuk yang pertama adalah tindak pidana umum, untuk berkoordinasi dengan penyidik baik itu PPNS dan penyidik kepolisian, untuk segera dapat mendukung pelaksanaan pemerkasan,” ujarnya

Sementara untuk instrumen pidana khusus, Burhanuddin menyebut hingga kini belum

ditemukan indikasi korupsi yang dilakukan korporasi terkait kasus karhutla.

Meski demikian, dia telah meminta jajarannya segera menindaklanjuti apabila dalam proses penanganan ditemukan unsur pidana khusus, termasuk dugaan korupsi.

“Kemudian untuk pidana khusus, belum sampai saat ini belum ada, tetapi saya sudah perintahkan apabila ada unsur-unsur pidana khususnya di situ, segera tindak lanjuti,” ucap dia.

Adapun untuk instrumen perdata, Kejagung masih menunggu hasil keseluruhan penanganan karhutla. Setelah proses tersebut rampung, kejaksaan akan

menentukan langkah gugatan perdata berdasarkan hasil yang diperoleh.

Burhanuddin mengatakan, Kejagung juga menunggu surat kuasa khusus dari kementerian terkait sebagai dasar untuk melakukan gugatan perdata terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab.

“Kami akan menunggu hasil dari selesainya ini baru kita akan tentukan itu gugatan-gugatan dan kita akan tanggap gugatan-gugatan, sambil menunggu surat kuasa khusus yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan, kemudian Lingkungan Hidup, dan juga ATR/BPN,” tutur dia.

● (Egi)

PENGAMAT: AHY

yang menegaskan bahwa kekuasaan memiliki batas waktu, hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak boleh dihalangi, serta demokrasi membutuhkan mekanisme checks and balances.

“Demokrat sedang mencari posisi di tengah. Mereka ingin tetap berada di dalam pemerintahan Prabowo, tetapi tidak ingin seluruh identitas politiknya ikut melebur menjadi identitas pemerintahan,” kata Arifki di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Menurut Arifki, langkah ini merupakan strategi elektoral yang sangat rasional. Jika Demokrat terlalu identik dengan kabinet, partai berlogo bintang mercy tersebut berpotensi kehilangan ruang untuk menjangkau pemilih kritis akibat ketatnya persaingan memperebutkan

basis pemilih pro-pemerintah. Sebab itu, Demokrat berupaya merangkul ceruk pemilih kritis tanpa harus memosisikan diri sebagai oposisi.

“Demokrat tidak ingin keluar dari pemerintahan, tetapi juga tidak ingin keluar dari radar pemilih yang kritis. Mereka bisa tetap mendukung pemerintah yang kuat dan efektif, sekaligus mengingatkan bahwa kekuasaan harus dibatasi dan kritik wajib dihormati,” ujarnya.

Arifki menyebut posisi unik ini sebagai strategi “loyalitas berjarak”. Langkah ini menjadi krusial sebagai persiapan menghadapi pertarungan Pemilu 2029, di mana Demokrat membutuhkan brand politik tersendiri agar tidak terserap oleh identitas partai-partai koalisi lainnya. Strategi

ini sekaligus membuka berbagai peluang bagi AHY dalam bursa capres maupun cawapres 2029.

Terlebih lagi, penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) nol persen pada 2029 memberi ruang bagi Demokrat untuk membentuk poros sendiri jika posisi tawar AHY sebagai cawapres pendamping Prabowo melemah. Ditambah lagi, AHY harus bersaing ketat dengan figur strategis lain seperti Gibran Rakabuming Raka yang juga memiliki modal politik kuat.

“Loyal kepada pemerintahan dalam hal-hal yang memang menjadi komitmen koalisi, tetapi tetap memiliki jarak yang cukup untuk menyampaikan kritik dan memperjuangkan kepentingan publik. AHY seperti sedang mengatakan kepada publik: kami

bagian dari pemerintahan, tetapi kami bukan pemerintah,” jelas Arifki.

Meski posisi ini menguntungkan menuju 2029 karena mengamankan dua modal sekaligus—akses kekuasaan dan dukungan pemilih kritis—Arifki mengingatkan tantangan besar terkait konsistensi dan risiko identitas ganda.

“Publik tentu akan menguji konsistensinya. Jangan sampai sikap kritis ini hanya menjadi kosmetik politik semata. Jika ingin mempertahankan kepercayaan pemilih kritis, Demokrat harus berani menunjukkan perbedaan nyata ketika ada kebijakan yang perlu dikritisi, atau bahkan mengambil keputusan yang lebih berani dengan berada di luar pemerintahan,” pungkasnya.

● (Agus)

LAHAN BEKAS

dan memang disuruh dengan uang hanya Rp 500 ribu, diberi uang,” kata Suharyanto.

Dia mengatakan dugaan kesengajaan karhutla juga ditemukan di Kalimantan. Setelah dibakar, menurut dia, lahan berubah menjadi perkebunan sawit.

“Kemudian, di Kalimantan Barat terlihat di gambar lokasi yang baru saja terbakar, belum selesai kebakarannya di tempat lain, lokasi itu sudah berubah jadi rencana penanaman pohon, pohon sawit,” ujarnya.

Prabowo kemudian bertanya

kepada Kapolri jumlah pelaku karhutla yang ditangkap. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan sudah ratusan tersangka terkait karhutla.

“200 LP yang kami proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai, kemu-

dian ada delapan korporasi yang kami proses. Kemudian, kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin,” kata Sigit. ● (Egi)

Bezzecchi Tak Sabar Hadapi MotoGP San Marino 2026

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Pebalap Aprilia, Marco Bezzecchi, tak sabar menghadapi MotoGP San Marino 2026 yang akan berlangsung di Sirkuit Misano, 11-13 September. Balapan tersebut memiliki arti khusus bagi pebalap asal Italia itu karena lokasinya hanya beberapa kilometer dari kampung halamannya, Rimini.

Bezzecchi menyebut MotoGP San Marino selalu menghadirkan suasana berbeda dibandingkan seri lainnya. Dukungan dari publik Italia membuat balapan di Misano terasa lebih istimewa.

“Grand Prix kandang selalu memiliki sesuatu yang ajaib dan spesial,” kata Bezzecchi seperti dilansir Motosan, Selasa (8/9).

Kedekatan Misano dengan Rimini membuat sirkuit tersebut layaknya rumah kedua bagi Bezzecchi. Bahkan, ia masih akan berada di rumah hingga Kamis sebelum kemudian pindah ke motorhome untuk menjalani rangkaian balapan.

Antusiasme Bezzecchi juga meningkat setelah meraih hasil positif dalam dua seri terakhir. Tambahan poin tersebut membuatnya tetap berada dalam persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026.

“Beberapa waktu terakhir memang cukup sulit, tetapi dua balapan terakhir berjalan dengan baik. Kami berhasil mendapatkan

kembali beberapa poin,” ujarnya.

Setelah MotoGP Aragon, Bezzecchi menempati posisi ketiga klasemen sementara. Ia tertinggal 24 poin dari Jorge Martin yang berada di puncak klasemen. Sementara itu, Marc Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 19 poin dari Martin.

Dengan kondisi tersebut, MotoGP San Marino tidak hanya menjadi balapan kandang bagi Bezzecchi. Seri Misano juga menjadi peluang penting bagi pebalap Aprilia tersebut untuk memangkas jarak dengan para pesaingnya dalam perebutan gelar.

Tampil di depan pendukung sendiri, Bezzecchi bertekad memberikan penampilan terbaik dan menjaga peluangnya dalam persaingan kejuaraan.

“Anda harus percaya pada diri sendiri, Anda harus berjuang. Kimi melakukannya, dan saya tentu akan berusaha memberikan yang terbaik,” kata Bezzecchi.

● (hmi)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN MERDEKA
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp30.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**